



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN

Dibacakan Oleh BAMBANG HERMANTO, SE

Anggota DPR RI No – 296

Daerah Pemilihan JAWA BARAT VIII



JAKARTA, 1 DESEMBER 2021



**PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN**

Dibacakan Oleh : BAMBANG HERMANTO, SE
Nomor Anggota : A-296
Daerah Pemilihan : JAWA BARAT VIII

**Yang Terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR-RI,
Yang Kami Hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Yang Kami Hormati Ibu Menteri Keuangan RI
Yang Kami Hormati Menteri Dalam Negeri RI
Yang Kami Hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Yang Kami Hormati Menteri Perhubungan RI
Yang Kami Hormati Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi RI
Yang Kami Hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Hadirin Yang Kami Hormati,**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua.***

Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI, dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap ***Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.*** Untuk itu perkenankan kami menyampaikan Pendapat Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI. ✕

Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana pembahasan yang telah berkembang di dalam rapat Panja tentang ***Perubahan atas Undang Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan***, bahwa dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, terdapat berbagai perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan jalan yang belum diakomodir oleh UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Oleh sebab itu, revisi terhadap Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan perlu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Secara substansi, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian Fraksi Partai GOLKAR untuk dimasukkan menjadi norma di dalam RUU No. 38 tahun 2004 tentang jalan diantaranya:

1. Revisi UU No 38 tentang Jalan mengatur tentang pengambilalihan wewenang pembangunan Jalan Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Jalan Daerah merupakan tulang punggung bagi akses serta mobilitas penduduk, barang dan jasa di provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan umum, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan urusan pembangunan jalan provinsi dan jalan Kabupaten/Kota. Hal ini adalah poin penting sebab selama ini pemerintah daerah memiliki kemampuan terbatas dalam melakukan pembangunan jalan baru serta perawatan jalan-jalan di daerah. Oleh sebab itu, intervensi pusat melalui APBN merupakan terobosan penting guna meningkatkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas jalan hingga ke pelosok negeri.
2. Fraksi Partai GOLKAR melalui Revisi UU No 38 tentang Jalan memberikan perhatian khusus terhadap kaum disable. Perhatian khusus tersebut hendaknya diwujudkan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana yang memudahkan kaum disable sebagai pengguna jalan. Hal itu sebagai bentuk perhatian negara terhadap penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap jalan.
3. Fraksi Partai GOLKAR mendukung penyempurnaan pengaturan tentang Jalan Tol sebagai bagian dari Sistem Jaringan Jalan Nasional. Selain hal tersebut, pengaturan tarif Jalan Tol menjadi domain pemerintah dengan mempertimbangkan diantaranya; kemampuan bayar pengguna jalan, keuntungan biaya operasi kendaraan, kelayakan investasi, pengaruh laju inflasi

dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol. Dalam hal kenaikan tarif, pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif di luar 2 tahun sekali.

Pimpinan, Bapak dan Ibu Menteri, dan Anggota Komisi V yang kami hormati,
Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju terhadap revisi *UU tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.*

Demikian pendapat Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan taufiq-Nya kepada kita untuk dapat terus berkarya dan mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Billahittaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 1 Desember 2021

PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



H. KAHAR MUZAKIR

Ketua



Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum

Sekretaris